



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021



SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan tahun 2021 Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan tahun 2021 Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA tahun 2021 Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021 memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Januari 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Drs. DEDDY PERMANA, M.M**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
NIP.19670810 198809 1 002

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas , (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Januari 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Drs. DEDDY PERMANA, M.M**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
NIP.19670810 198809 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Lampiran .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	I-2
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....	I-2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	I-3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	I-3
<b>BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET</b>	
<b>KINERJA APBD</b>	
2.1 Kebijakan Keuangan .....	II-1
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	II-1
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	III-1
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target	
Yang Telah Ditetapkan .....	III-2
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
4.1 Entitas Akuntansi.....	IV-1
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan .....	IV-1
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan	
Keuangan .....	IV-2

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	IV-3
--	------

#### BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	V-1
5.2 Laporan Operasional .....	V-6
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas .....	V-15
5.4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	V-16

#### BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON

KEUANGAN.....	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

## LAMPIRAN

- Lampiran A : Hutang Jangka Pendek
- Lampiran B : Bukti Setoran UYHD
- Lampiran C : Rekapitulasi dan Pemungutan dan Penyetoran Pajak TA 2021
- Lampiran D : Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Per 31 Desember 2021
- Lampiran E : Daftar Persediaan Barang Per 31 Desember 2021
- Lampiran F : Daftar hasil pengadaan barang dan jasa Per 31 Desember 2021
- Lampiran G : Daftar hasil pengadaan Barang Per 31 Desember 2021
- Lampiran H : Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Per 31 Desember 2021
- Lampiran I : Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir menjadi asset Per 31 Desember 2021
- Lampiran J : Buku Inventaris Ekstra Kompatabel
- Lampiran K : Daftar Mutasi Barang Per 31 Desember 2021
- Lampiran L : Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Per 31 Desember 2021
- Lampiran M : Buku Inventaris Per 31 Desember 2021
- Lampiran N : Rekapitulasi Buku Inventaris Per 31 Desember 2021
- Lampiran O : Kartu Inventaris Barang
- Lampiran P : Daftar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin Per 31 Desember 2021
- Lampiran Q : Daftar Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Kantor Per 31 Desember 2021
- Lampiran R : Daftar Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021
- Lampiran S : Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota no 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat DPRD sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati no 73 tahun 2018 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD ;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD ;
- c. Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas Pokok diatas Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian tugas-tugas Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, rumah tangga/perengkapan, kepegawaian,keuangan, perjalanan dinas, keamanan dan ketertiban;
- b. Pengkoordinasian perumusan perencanaan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pengaturan pendistribusian dan penyelenggaraan tugas dalam rangka pelayanan secara administrasi kepada anggota DPRD dibidang ketatausahaan, rumah tangga/perengkapan, kepegawaian,keuangan, perjalanan dinas, penyelenggaraan Sidang/Rapat keamanan dan ketertiban DPRD;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat DPRD percatur wulan;
- e. Memfasilitasi rapat – rapat, penjadwalan rapat, pelaksanaan rapat dan pendistribusian bahan – bahan rapat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Mengkoordinir pembuatan Notulen Rapat/Risalah rapat pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD;
- g. Pengendalian pengumpulan informasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Daerah ;



- h. Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD pada media cetak/elektronik dengan persetujuan pimpinan DPRD ;
- i. Pengaturan Jadwal terhadap masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi kepada DPRD

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

## **1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. Nomor 93 Tanggal 4 Desember tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah

#### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional , Neraca dan Laporan Ekuitas,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.4 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

## II. Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

## III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

## IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

## V. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

- 5.1 Neraca
- 5.2 Laporan operasional
- 5.3 Laporan perubahan ekuitas
- 5.4 Laporan realisasi anggaran

## VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

## VII. Penutup.



**BAB II**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**  
**TARGET KINERJA APBD**

**2.1. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2021 meliputi hal berikut :

**2.1.1 Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

**2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dengan demikian, DPA Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021, Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat menetapkan 2 program yang didukung oleh 18 kegiatan dan 76 sub kegiatan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Kedua ( 2 ) program dan 18 kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang diatas 75 %. Namun tidak semua sub kegiatan memiliki realisasi kinerja 75%.

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	KET
<b>I</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>40.465.800.487</b>	<b>36.934.834.549</b>	<b>3.530.965.938</b>	91,27	
1	2					
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.708.131.187</b>	<b>18.636.103.998</b>	<b>1.072.027.189</b>	94,56	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37.777.200</b>	<b>34.336.750</b>	<b>3.440.450</b>	90,89	
1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.596.600	4.748.000	848.600	84,84	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.458.700	4.194.500	264.200	94,07	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5.595.800	5.255.500	340.300	93,91	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.583.000	5.112.250	470.750	91,56	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.341.500	4.976.000	365.500	93,15	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.141.700	5.519.750	621.950	89,87	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.059.900	4.530.750	529.150	89,54	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.141.595.332</b>	<b>2.977.403.933</b>	<b>164.191.399</b>	<b>94,77</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.725.532	2.744.756.783	150.968.749	94,78	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	206.575.000	204.051.000	2.524.000	98,77	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.535.700	8.324.000	9.211.700	47,46	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.659.600	7.109.000	550.600	92,81	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.739.600	5.367.750	371.850	93,52	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.849.500	3.285.000	564.500	85,33
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.510.400	4.510.400	0	100
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>318.738.400</b>	<b>235.574.750</b>	<b>83.163.650</b>	73,90
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	151.238.500	149.671.000	1.567.500	98,96
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.000.000	74.900.900	1.099.100	98,55
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.499.900	11.002.850	80.497.050	12,02
IV	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.531.143.800</b>	<b>1.202.482.504</b>	<b>328.661.296</b>	78,53
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	693.700.100	558.117.379	135.582.721	80,45
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	274.526.200	229.400.250	45.125.950	83,56
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.295.000	18.628.375	18.666.625	49,94
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	285.507.500	245.262.500	40.245.000	85,90
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.115.000	151.074.000	89.041.000	62,91
V	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>158.600.400</b>	<b>143.737.580</b>	<b>14.862.820</b>	<b>90,62</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000	0	80.000	0
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.520.400	143.737.580	14.782.820	90,67
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>460.119.600</b>	<b>417.684.691</b>	<b>42.434.909</b>	90,77
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000	8.965.000	4.535.000	66,40
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.729.600	173.273.291	23.456.309	88,07
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.890.000	235.446.400	14.443.600	94,22
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.546.673.800</b>	<b>1.389.494.746</b>	<b>157.179.054</b>	89,83
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	757.599.000	697.568.094	60.030.906	92,07

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	620.799.800	561.024.852	59.774.948	90,37	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	168.275.000	130.901.800	37.373.200	77,79	
<b>VIII</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>15.320.800</b>	<b>15.034.000</b>	<b>286.800</b>	<b>98,12</b>	
1	Fasilitasi Keprotokolan	6.249.100	6.215.000	34.100	99,45	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.794.700	1.654.000	140.700	92,16	
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	7.277.000	7.165.000	112.000	98,46	
<b>IX</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>12.062.360.455</b>	<b>11.836.906.294</b>	<b>225.454.161</b>	<b>98,13</b>	
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.781.930.455	11.623.161.294	158.769.161	98,65	
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	227.930.000	213.745.000	14.185.000	93,77	
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	52.500.000	0	52.500.000	0	
<b>X</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>435.801.400</b>	<b>383.448.750</b>	<b>52.352.650</b>	<b>87,98</b>	
1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9.000.000	8.643.000	357.000	96,03	
2	Fasilitasi Fraksi DPRD	10.799.800	7.726.750	3.073.050	71,54	
3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	408.005.600	367.079.000	40.926.600	89,96	
4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	7.996.000	0	7.996.000	0	
<b>II</b>	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>20.757.669.300</b>	<b>18.298.730.551</b>	<b>2.458.938.749</b>	<b>88,15</b>	
<b>I</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>5.735.725.300</b>	<b>4.582.636.266</b>	<b>1.153.089.034</b>	<b>79,89</b>	
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.000.000	3.384.000	616.000	84,6	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.598.358.600	4.537.293.516	1.061.065.084	81,04	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	22.525.100	5.428.250	17.096.850	24,09	
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	92.144.700	29.445.500	62.699.200	31,95	



5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	18.696.900	7.085.000	11.611.900	37,89
II	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>165.364.600</b>	<b>99.274.150</b>	<b>66.090.450</b>	<b>60,03</b>
1	Pembahasan KUA dan PPAS	30.600.000	18.000.000	12.600.000	58,82
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.250.000	10.630.000	18.620.000	36,34
3	Pembahasan APBD	26.963.900	18.396.750	8.567.150	68,22
4	Pembahasan APBD Perubahan	28.088.900	24.295.500	3.793.400	86,49
5	Pembahasan Laporan Semester	23.722.900	9.625.000	14.097.900	40,57
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	26.738.900	18.326.900	8.412.000	68,54
III	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>175.298.700</b>	<b>106.532.250</b>	<b>68.766.450</b>	<b>60,77</b>
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	112.022.000	85.944.750	26.077.250	76,72
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.668.000	1.994.000	1.674.000	54,36
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.659.600	1.874.500	2.785.100	40,22
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.177.000	2.308.000	1.869.000	55,25
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3.837.000	3.766.000	71.000	98,14
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	21.666.700	1.950.500	19.716.200	9,00
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	22.659.000	8.280.000	14.379.000	36,54
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.609.400	414.500	2.194.000	15,88
IV	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.788.326.800</b>	<b>2.695.918.300</b>	<b>92.408.500</b>	<b>96,68</b>
1	Bimbingan Teknis DPRD	1.447.110.300	1.416.247.700	30.862.600	97,86
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.063.566.000	1.046.003.600	17.562.400	98,34
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6.999.900	0	6.999.900	0

4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	255.260.000	223.950.000	31.310.000	87,73	
5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10.392.000	9.120.000	1.272.000	87,75	
6	Penyusunan Program Kerja DPRD	4.998.600	597.000	4.401.600	11,94	
<b>V</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>1.138.761.200</b>	<b>840.877.100</b>	<b>297.884.100</b>	<b>73,84</b>	
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	199.858.000	85.957.100	113.900.900	43,00	
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	109.374.800	35.166.000	74.208.800	32,15	
3	Pelaksanaan Reses	829.528.400	719.754.000	109.774.400	86,76	
<b>VI</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>14.984.000</b>	<b>3.324.000</b>	<b>11.660.000</b>	<b>22,18</b>	
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	4.984.000	0	4.984.000	0	
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	10.000.000	3.324.000	6.676.000	33,24	
<b>VII</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>29.527.500</b>	<b>12.025.000</b>	<b>17.502.500</b>	<b>40,72</b>	
1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	9.077.500	8.124.000	953.500	89,49	
2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	20.450.000	3.901.000	16.549.000	19,07	
<b>VIII</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>10.709.681.200</b>	<b>9.958.143.485</b>	<b>751.537.715</b>	<b>92,98</b>	
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.679.195.500	9.938.995.985	740.199.515	93,06	
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	4.610.000	4.202.000	408.000	91,14	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24.300.500	14.945.500	9.355.000	61,50	
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.575.200	0	1.575.200	0	



**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**3.1.1. Belanja**

Tahun 2021 nilai realisasi Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 sebesar Rp.36.934.834.549,00 jumlah tersebut mencapai 91,27% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp. 40.465.800.487,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>Belanja Daerah</b>	<b>40.465.800.487</b>	<b>36.934.834.549,00</b>	91,27
<b>Belanja Operasi</b>	<b>39.766.814.487,00</b>	<b>36.309.138.746,00</b>	<b>91.31</b>
Belanja Pegawai	14.601.948.395,00	14.312.987.719,00	98,02
Belanja Barang dan jasa	25.164.866.092,00	21.996.151.027,00	87,41
<b>Belanja Modal</b>	<b>698.986.000,00</b>	<b>625.695.803,00</b>	89,51
Belanja Modal Tanah	199.836.000,00	199.213.219,00	99,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	483.850.000,00	412.294.209,00	85,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.300.000,00	14.188.375,00	92,73
Jumlah	<b>40.465.800.487,00</b>	<b>36.934.834.549,00</b>	<b>91,27</b>

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar 14.601.948.395,00 terealisasi sebesar Rp. 14.312.987.719,00 atau sebesar 98,02%. Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp.25.164.866.092,00 terealisasi sebesar Rp.21.996.151.027,00 atau sebesar 87,41%. Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp 698.986.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp 625.695.803,00 atau sebesar

89,51% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset tetap lainnya.

### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD Perubahan, ini disebabkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang telah dilaksanakan pada kegiatan yang bersangkutan lambat dalam proses penyelesaian dan penyampaian ke bendahara.

Adapun beberapa sub kegiatan yang realisasinya di bawah 75% yaitu :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
1	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>17.535.700</b>	<b>8.324.000</b>	<b>47,46</b>

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena intensitas pekerjaan yang tinggi dan tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas, sehingga realisasi nya tidak tercapai.

2	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan</b>	<b>91.499.900</b>	<b>11.002.850</b>	<b>12,02</b>
---	---	-------------------	-------------------	--------------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena tidak dapat diikuti karena masih dalam suasana Pandemi COVID-19

3	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>240.115.000</b>	<b>151.074.000</b>	<b>62,91</b>
---	---	--------------------	--------------------	--------------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena Intensitas pekerjaan yang tinggi dan tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas, sehingga realisasinya tidak tercapai.

4	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>13.500.000</b>	<b>8.965.000</b>	<b>66,40</b>
---	---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena nilai kwitansi di atas 5 juta tidak terlalu banyak, sehingga tidak lagi menggunakan materai.

5	<b>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</b>	<b>52.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	-------------------	----------	----------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena pandemic COVID-19 yang meningkat sehingga adanya kekhawatiran anggota DPRD terpapar COVID-19 dalam melaksanakan program kegiatan Medical Check up.

6	<b>Fasilitasi Fraksi DPRD</b>	<b>10.799.800</b>	<b>7.726.750</b>	<b>71,54</b>
---	-------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena tingkat intensitas pekerjaan yang tinggi, sehingga sub kegiatan tersebut tidak terlaksana.

7	<b>Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan</b>	<b>22.525.100</b>	<b>5.428.250</b>	<b>24,09</b>
---	--	-------------------	------------------	--------------

Rendah nya Realisasi Anggaran disebabkan karena kurangnya permasalahan yang ditemui yang memerlukan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan.

8	<b>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan /atau Naskah Akademik</b>	<b>92.144.700</b>	<b>29.445.500</b>	<b>31,95</b>
---	--	-------------------	-------------------	--------------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena tidak adanya naskah akademik/Ranperda inisiatif yang diusulkan pada tahun 2021.

9	<b>Penyusunan Tata Tertib DPRD</b>	<b>18.696.900</b>	<b>7.085.000</b>	<b>37,89</b>
---	------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena tidak ada perubahan yang diajukan oleh anggota DPRD terhadap tata tertib DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

10	<b>Pembahasan KUA dan PPAS</b>	<b>30.600.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>58,82</b>
----	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Untuk sub kegiatan pembahasan KUA dan PPAS yang telah di anggarkan, dalam pelaksanaannya di padatkan penjadwalan untuk pembahasannya dan dilakukan pengurangan

bagi peserta rapat sehingga intensitas pelaksanaan rapat berkurang, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kerumunan terkait protokol kesehatan akibat pandemic Covid 19.

11	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.250.000	10.630.000	36,34
----	---	------------	------------	-------

Untuk sub kegiatan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS yang telah di anggarkan, dalam pelaksanaannya di padatkan penjadwalan untuk pembahasannya dan dilakukan pengurangan bagi peserta rapat sehingga intensitas pelaksanaan rapat berkurang, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kerumunan terkait protokol kesehatan akibat pandemic Covid 19.

12	Pembahasan APBD	26.963.900	18.396.750	68,22
----	-----------------	------------	------------	-------

Untuk sub kegiatan pembahasan APBD yang telah di anggarkan, dalam pelaksanaannya di padatkan penjadwalan untuk pembahasannya dan dilakukan pengurangan bagi peserta rapat sehingga intensitas pelaksanaan rapat berkurang, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kerumunan terkait protokol kesehatan akibat pandemic Covid 19.

13	Pembahasan Laporan Semester	23.722.900	9.625.000	40,57
----	-----------------------------	------------	-----------	-------

Untuk sub kegiatan pembahasan Laporan Semester yang telah di anggarkan, dalam pelaksanaannya di padatkan penjadwalan untuk pembahasannya dan dilakukan pengurangan bagi peserta rapat sehingga intensitas pelaksanaan rapat berkurang, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kerumunan terkait protokol kesehatan akibat pandemic Covid 19.

14	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	26.738.900	18.326.900	68,54
----	-------------------------------------	------------	------------	-------

Untuk sub kegiatan pembahasan Pertanggung Jawaban APBD yang telah di anggarkan, dalam pelaksanaannya di padatkan penjadwalan untuk pembahasannya dan dilakukan pengurangan bagi peserta rapat sehingga intensitas pelaksanaan rapat berkurang, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kerumunan terkait protokol kesehatan akibat pandemic Covid 19.

15	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.668.000	1.994.000	54,36
----	---	-----------	-----------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena proses pengajuan anggaran yang tidak disetujui oleh pimpinan dikarenakan tingginya mobilitas pimpinan menyebabkan lambatnya proses peninjauan ulang oleh pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan.

16	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.659.600	1.874.500	40,22
----	--	-----------	-----------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena proses pengajuan anggaran yang tidak disetujui oleh pimpinan dikarenakan tingginya mobilitas pimpinan menyebabkan lambatnya proses peninjauan ulang oleh pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan.

17	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.177.000	2.308.000	55,25
----	--	-----------	-----------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena proses pengajuan anggaran yang tidak disetujui oleh pimpinan dikarenakan tingginya mobilitas pimpinan menyebabkan lambatnya proses peninjauan ulang oleh pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan

18	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	21.666.700	1.950.500	9,00
----	---	------------	-----------	------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena Sub kegiatan ini proses persetujuan untuk penambahan tenaga administrasi yang telah dianggarkan tidak disetujui oleh pimpinan.

19	Pengawasan Penggunaan Anggaran	22.659.000	8.280.000	36,54
----	--------------------------------	------------	-----------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan Karena belanja tenaga administrasi yang telah dianggarkan pada awal tahun 2021, namun baru direalisasikan pada bulan September 2021, karena formasi untuk tenaga administrasi baru terisi pada bulan September 2021.

20	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.609.400	414.500	15,88
----	--	-----------	---------	-------



Rendahnya Realisasi Anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan proses pengajuan anggaran yang tidak disetujui oleh pimpinan dikarenakan tingginya mobilitas pimpinan menyebabkan lambatnya proses peninjauan ulang oleh pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan.

21	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6.999.900	0	0
----	--	-----------	---	---

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena belum adanya permasalahan yang urgen yang membutuhkan pendampingan dari pakar ahli alat kelengkapan dan belum adanya kata sepakat untuk penetapan kelompok pakar/tim ahli.

22	Penyusunan Program Kerja DPRD	4.998.600	597.000	11,94
----	-------------------------------	-----------	---------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena belum dilaksanakannya rapat khusus untuk menetapkan program kerja DPRD.

23	Kunjungan Kerja dalam Daerah	199.858.000	85.957.100	43,00
----	------------------------------	-------------	------------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena intensitas rapat dan kunjungan kerja luar daerah yang cukup padat sehingga kunjungan pimpinan dan anggota komisi ke kecamatan ( 4 x sebulan ) tidak terlaksana.

24	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	109.374.800	35.166.000	32,15
----	-------------------------------------	-------------	------------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran tergantung pada surat masuk atas permintaan masyarakat untuk hearing/audience dengan anggota DPRD atau keinginan anggota DPRD untuk melakukan audience dengan masyarakat /bukan keinginan Sekretariat DPRD.

25	Penyusunan Kode Etik DPRD	4.984.000	0	0
----	---------------------------	-----------	---	---

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan belum dilakukannya perubahan terhadap kode etik DPRD yang lama.

26	Pengawasan Kode Etik DPRD	10.000.000	3.324.000	33,24
----	---------------------------	------------	-----------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena tidak adanya kasus/pelanggaran terhadap kode etik.

27	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	20.450.000	3.901.000	19,07
----	---	------------	-----------	-------

Rendahnya Realisasi anggaran disebabkan karena pada sub kegiatan ini buletin edisi khusus DPRD Tidak terbit.

28	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24.300.500	14.945.500	61,50
----	---	------------	------------	-------

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena belum terlaksananya/efektifnya penggunaan belanja pada fasilitasi rapat dan administrasi Badan Musyawarah.

29	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.575.200	0	0
----	--------------------------------	-----------	---	---

Rendahnya Realisasi Anggaran disebabkan karena intensitas pekerjaan yang tinggi sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dengan ditetapkan *Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi No 23 Thn 2014* maka penyusunan laporan keuangan tahun 2021, mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

#### **4.1 Entitas Akuntansi.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknik pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2022 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berperan sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, kewajiban dan ekuitas dana di neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

#### **4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset**

**a. Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral tanggal neraca.

**b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

**c. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

- Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**d. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

**e. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

**f. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

**4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mulai 2016 diperhitungkannya nilai penyusutan atas aktiva tetap.

#### 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya ( setelah dikompesasikan dengan pengeluaran ).

#### 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned* ;
2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. ( setelah dikompensasikan dengan pengeluaran ).

#### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran

setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas di rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara p[engeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya Kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya Konsumsi Aset

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.







**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Neraca**

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 dan 2020. Dimana sisa UYHD telah disetor ke Bank Nagari pada tanggal 31 Desember 2021.

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.2	Persediaan	17.477.800,00	12.082.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari :

- Alat Tulis Kantor	4.098.500,00	2.572.500,00
- Alat Rumah Tangga	13.379.300,00	9.510.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.477.800,00</b>	<b>12.082.500,00</b>

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.1.3	Tanah	1.034.983.719,00	805.571.500,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau di kuasai Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

-Saldo Awal ( audited 31 Desember 2020 )	: Rp. 805.571.500,00
-Mutasi Tambah	: Rp. 229.412.219,00
Jumlah	Rp. 1.034.983.719,00

Dimana pada tahun 2021 terjadi mutasi tambah sebesar Rp. 229.412.219,00 yang terdiri dari :

- Tanah Persil ( Pematangan lahan )	: Rp 199.213.219,00
- Konsultan Perencanaan Pematangan lahan	: Rp 15.884.000,00
- Konsultan Perencanaan Pengawasan Pematangan Lahan	: Rp 13.915.000,00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Pematangan lahan	: Rp <u>400.000,00</u>
	<b>Rp 229.412.219,00</b>

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.4 Peralatan dan Mesin</b>	<b>13.764.066.813,00</b>	<b>13.334.352.604,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

Adapun Peralatan dan Mesin di Sekretariat DPRD terdiri dari :

SALDO AWAL ( AUDITED 31 DES 2021 )	<b>13.334.352.604,00</b>	<b>11.795.352.951,00</b>
MUTASI TAMBAH		<b>3.164.310.320,00</b>
Belanja Modal tahun 2021	412.294.209,00	3.158.053.600,00
Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisir jadi Aset	25.320.000,00	4.950.000,00
Hibah	-	1.306.720,00
Koreksi asset ekstrakom akibat penghapusan	(7.900.000,00)	4.554.000,00
Mutasi Kurang Reklas ( ALT )	-	5.000.000,00
Perpindahan KIB E ke KIB B	-	42.250.000,00
MUTASI KURANG	-	(1.658.006.667,00)
<b>Saldo PER 31 DES 2021</b>	<b>13.764.066.813,00</b>	<b>13.334.352.604,00</b>

Adanya Mutasi tambah berupa :

-	Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Rp 412.294.209,00 yaitu	
1	Mesin Penghancur Kertas	5.975.000,00
2	Lemari Arsip Ruang Humas	9.900.000,00
3	CCTV Sekretariat DPRD	24.882.500,00
4	CCTV Rumah Dinas	24.967.080,00
5	Drone @23.615.699 1 unit	23.615.699,00
6	HP Monitot drone ( ipon 12, 128 Gb ) 1 unit	16.167.500,00
7	Kamera Sony @18.415.000 4 bh	73.660.000,00
8	Bendera Rimpel 1 set	2.610.000,00
9	Lemari Arsip Ruang Ketua	19.890.000,00
10	Lensa kamera sony @ 14.865.000 4bh	59.460.000,00
11	Speaker Fortable @ 5.950.000 3 bh	17.850.000,00
12	PC Intel 23" 3 unit	59.595.000,00
13	PC Intel Core i5 21 " 3 unit	44.837.100,00
14	Hardisk external 2 bh	1.590.435,00
15	Printer Epson L1210 7 bh	17.492.895,00
16	Printer Epson L3210 3 bh	<u>9.801.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>412.294.209,00</b>

2. Penambahan Aset dari Belanja Barang dan Jasa yang di Kapitalisir jadi Aset Belanja Barang dan Jasayang dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp. 25.320.000,00.yang terdiri dari :

1.	Kompor Gas 1 Unit	400.000,00
2.	Figura Foto Bupati , Wk Bupati, Gubenur,Wk Gubenur 15 bh	7.500.000,00
3.	Sound System Mobil 1 Paket	15.970.000,00
4.	Hardisk Eksternal 1 bh	<u>1.450.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>25.320.000,00</b>

3. Penambahan asset dari koreksi asset ekstrakom akibat penghapusan sebesar Rp. 7.900.000,00, yang terdiri dari :

1.	Kompor Gas 1 unit	400.000,00
2.	Figura Foto Bupati , Wk Bupati, Gubenur,Wk Gubenur 15 bh	<u>7.500.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>7.900.000,00</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.1.5 Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>24.429.587.536,00</b>	<b>24.309.443.736,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat DPRD Posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

SALDO AWAL ( AUDITED 31 DES 2020)	24.309.443.736,00	<b>24.309.443.736</b>
MUTASI TAMBAH	120.143.800,00	-
Saldo PER 31 DES 2021	<b>24.429.587.536,00</b>	<b>24.309.443.736,00</b>

Adanya Mutasi tambah berupa :

- Penambahan Gedung dan Banguna dari Belanja Modal Rp.120.143.800,00 yaitu:

1. Pembuatan Taman di Rumah Dinas	99.750.000,00
2. Konsultasi Perencanaan Taman	7.994.800,00
3. Konsultasi Pengawasan Pembuatan Taman	11.999.000,00
4. Honorarium Pejabat Pengadaan Pembuatan Taman	400.000,00
Jumlah	<b>120.143.800,00</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.1.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>226.725.278,00</b>	<b>226.725.278,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat DPRD Posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.7 Aset Tetap Lainnya</b>	<b>194.972.375,00</b>	<b>180.784.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat DPRD Posisi 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari

1	Buku dan Perpustakaan	177.222.375,00	163.034.000,00
2	Barang bercorak Seni dan budaya	17.750.000,00	25.000.000,00
3	Meja Pimpong th 2017	-	(7.250.000,00)
		<b>194.972.375,00</b>	<b>180.784.000,00</b>

Peraturan Bupati No. 93 Th 2018 tanggal 4 Desember 2018, tentang perubahan ke 4 Peraturan Bupati No 23 Th 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Nilai KIB B dan KIB B Penyusutan Selisih 7.250.000,00 adalah Meja Pimpong Th 2017 berdasarkan Kebijakan Akuntansi Th 2018 . termasuk ke dalam alat olahraga.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.8 Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>16.923.462.940,53</b>	<b>15.392.356.287,03</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan Aset Tetap sampai dengan Posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Terdiri dari :

1.	Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.923.550.977,20	9.791.271.775,38
2.	Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.962.178.171,63	5.560.373.650,52
3.	Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	37.733.791,70	26.397.527,80
4.	Penyusutan asset tetap lainnya	-	14.313.333,33,00
		<b>16.923.462.940,53</b>	<b>15.392.356.287,03</b>

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.9 Aset Lainnya</b>	<b>60.390.000,00</b>	<b>60.390.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat DPRD Posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.1.10 Utang Belanja</b>	<b>14.095.604,00</b>	<b>14.042.137,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo utang Belanja Jasa Sekretariat DPRD Posisi 31 Desember 2021 dan 2020, Jumlah tersebut diatas merupakan jumlah hutang listrik, telepon dan internet pemakaian bulan Desember yang belum dibayarkan.

Tagihan Air	474.755,00	563.145,00
Tagihan Listrik	11.042.909,00	10.999.266,00
Tagihan telpon	92.440,00	104.226,00
Tagihan Internet	2.485.500,00	2.375.500,00
	<b>14.095.604,00</b>	<b>14.042.137,00</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.1.11 Ekuitas</b>	<b>22.790.644.976,47</b>	<b>23.522.951.193,97</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas pada Sekretariat DPRD Posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

## 5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan 2020. Jumlah Beban – LO tersebut terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.2.1 Beban</b>		<b>37.681.454.099,83</b>	<b>19.821.591.872,04</b>
	Beban Operasi	36.128.134.113,00	19.601.444.774,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.545.419.986,83	215.593.098,04
	Beban lain-lain	7.900.000,00	4.554.000,00
		<b>37.681.454.099,83</b>	<b>19.821.591.872,04</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban tahun 2021 dan tahun 2020 yang terdiri dari :

**5.2.1.1 Beban Operasi** **36.128.134.113,00** **19.601.444.774,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi tahun 2021 dan tahun 2020 yang terdiri dari :

- Beban Pegawai	<b>14.312.987.719,00</b>	<b>2.578.333.676,00</b>
- Beban Persediaan	<b>21.815.146.394,00</b>	<b>469.504.200,00</b>
- Beban Jasa	<b>3.733.277.999,00</b>	<b>4.020.223.063,00</b>
- Beban Pemeliharaan	<b>292.311.604,00</b>	<b>21.205.000,00</b>
- Beban Perjalanan Dinas	<b>15.479.121.651,00</b>	<b>12.512.178.835,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>36.128.134.113,00</b>	<b>19.601.444.774,00</b>

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1.1 Beban Pegawai</b>	<b>14.312.987.719,00</b>	<b>2.578.333.676,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam tahun Anggaran 2021 dan tahun 2020. Jumlah beban pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

**- Beban Gaji dan Tunjangan ASN** **1.910.752.267,00** **1.864.646.572,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.475.735.240,00	1.240.139.100,00
- Tunjangan Keluarga	142.610.507,00	123.134.528,00
- Tunjangan Jabatan	137.785.000,00	121.680.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	48.450.000,00	37.570.000,00
- Tunjangan Beras	92.697.600,00	78.430.860,00
- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	1.302.254,00	1.476.576,00
- Pembulatan Gaji	8.613,00	-



- Iuran Jaminan Kesehatan ASN	256.679,00	-
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.554.126,00	-
- Iuran Jaminan Kematian ASN	8.352.248,00	-
- Gaji Ketiga Belas	-	129.120.159,00
- Tunjangan Hari Raya	-	121.189.996,00
- Beban Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	-	11.905.353,00
Jumlah	<b>1.910.752.267,00</b>	<b>1.864.646.572,00</b>

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
- <b>Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>110.304.000,00</b>	<b>110.304.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2021 dan tahun 2020 yang terdiri dari :

- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan KDH / WKDH	110.304.000,00	110.304.000,00
	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>586.189.158,00</b>	<b>581.647.104,00</b>
Terdiri dari :		
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	586.189.158,00	581.647.104,00

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN</b>	<b>192.885.000,00</b>	<b>-</b>
Terdiri dari :		
- Beban Honorarium	192.885.000,00	
	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Beban Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>11.512.857.294,00</b>	<b>11.229.520.380,00</b>
Terdiri dari :		
- Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	<b>670.320.000,00</b>
- Tunjangan Keluarga DPRD	77.057.400,00	<b>66.578.400,00</b>
- Tunjangan Beras DPRD	89.511.120,00	<b>90.380.160,00</b>
- Uang Paket DPRD	67.032.000,00	<b>67.032.000,00</b>
- Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	<b>971.964.000,00</b>
- Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.898.100,00	-
- Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD	24.847.200,00	<b>16.991.100,00</b>
- Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	<b>2.646.000.000,00</b>
- Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	<b>661.500.000,00</b>
- Pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD	325.074,00	<b>290.952,00</b>
- Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD	1.714.688.400,00	-
- Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	<b>4.224.000.000,00</b>
- Tunjangan Badan Musyawarah	-	<b>24.299.100,00</b>
- Tunjangan Komisi	-	<b>44.213.400,00</b>
- Tunjangan Badan Anggaran	-	<b>23.385.600,00</b>

- Tunjangan Badan Kehormatan	-	<b>7.856.100,00</b>
- Tunjangan Perumahan	-	<b>1.639.920.000,00</b>
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian	-	<b>6.435.072,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>11.512.857.294,00</b>
		<b>11.229.520.380,00</b>

Tahun 2021 Gaji dan tunjangan DPRD senilai Rp 11.512.857.294,00 termasuk kedalam Beban pegawai, Sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sedangkan untuk tahun 2020 Gaji dan Tunjangan DPRD senilai Rp 11.229.520.380,00, tidak termasuk kedalam Beban Pegawai, sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2020 Laporan Keuangan DPRD yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan, laporannya tersendiri.

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
- <b>Uang Lembur</b>	-	<b>21.736.000,00</b>
Terdiri dari:		
- Uang Lembur PNS	-	-
- Uang Lembur Non PNS	-	21.736.000,00

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1.2 Beban Persediaan</b>	<b>2.310.435.140,00</b>	<b>469.504.200,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan dalam tahun Anggaran 2021 dan tahun 2020 . Jumlah beban persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban Bahan Pakai Habis	-	410.497.700,00
- Beban Bahan/ Material	-	59.006.500,00
- Bahan-bahan bakar dan pelumas	254.748.240,00	-
- Beban Bahan isi Tabung Gas	5.600.000,00	-

-	Beban alat /bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor	231.086.750,00	-
-	Beban alat /bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	437.270.050,00	-
-	Beban alat /bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	16.525.000,00	-
-	Beban alat /bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	24.959.000,00	-
-	Beban alat /bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	10.094.000,00	-
-	Beban alat /bahan untuk kegiatan kantor-Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor lainnya	5.218.600,00	-
-	Beban Makan Minum Rapat	774.755.000,00	-
-	Beban Makanan dan Minuman Jamuan tamu	181.247.500,00	-
-	Beban Pakaian Dinas dan Atribut pimpinan dan anggota DPRD	213.395.000,00	-
-	Beban Pakaian Dinas Haria ( PDH )	41.500.000,00	-
-	Beban Pakaian Dinas Lapangan ( PDL )	54.240.000,00	-
-	Beban Pakaian Adat Daerah	59.796.000,00	-
		<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1.3</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>3.733.277.999,00</b>	<b>4.020.223.063,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa dalam tahun Anggaran 2021 dan tahun 2020. Jumlah beban jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

-	Beban Jasa Kantor	-	509.177.271,00
-	Beban Jaminan Kesehatan PNS	-	-
-	Belanja iuran Jaminan / Asuransi	-	-
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
-	Belanja SEwa Aset Tetap lainnya	-	-
-	Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	-	-

- Belanja Jasa Konsultasi non Kontruksi	-	-
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	-	409.728.243,00
- Beban Cetak dan Penggandaan	-	157.997.800,00
- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	40.525.000,00
- Beban Makanan dan Minuman	-	1.083.167.200,00
- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	218.386.000,00
- Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	74.778.000,00
- Honorarium Non PNS	-	1.348.408.149,00
- Honorarium PNS	-	178.055.400,00
- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.110.000,00	-
- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.440.000,00	-
- Beban Honorarium Rohaniwan	3.450.000,00	-
- Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	31.716.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	552.561.250,00	-
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	74.200.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Ahli	220.800.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	281.334.000,00	-
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	175.184.633,00	-
- Beban Jasa Tenaga Supir	99.500.000,00	-

- Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	600.000,00	-
- Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	404.210.000,00	-
- Beban Tagihan Telepon	1.145.515,00	-
- Beban Tagihan Air	9.512.820,00	-
- Beban Tagihan Listrik	131.393.923,00	-
- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	344.640.000,00	-
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.274.500,00	-
- Beban Lembur	314.400.000,00	-
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	34.279.766,00	-
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.202.648,00	-
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.607.944,00	-
- Beban Sewa Peralatan Umum	136.150.000,00	-
- Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.500.000,00	-
- Beban Bimbingan Teknis	762.065.000,00	-
- Beban penghargaan suatu prestasi	21.000.000,00	-

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1.4 Beban Pemeliharaan</b>	<b>292.311.604,00</b>	<b>21.205.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan dalam tahun Anggaran 2021 dan tahun 2020. Jumlah beban pemeliharaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin	-	-
--	---	---

- Belanja Pemeliharaan jalan,irgasi dan jaringan	-	-
- Belanja Pemeliharaan Gedung / Ruangan/dinding	-	-
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	21.205.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	179.249.604,00	-
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	71.290.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.129.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	5.410.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	8.233.000,00	-
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.2.1.1.5 Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>15.479.121.651,00</b>	<b>12.512.178.835,00</b>

Jumlah tersebut merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun Anggaran 2021 dan tahun 2020. Jumlah beban perjalanan dinas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	237.215.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar	-	12.274.963.835,00

Daerah			
-	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.379.376.651,00	-
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.745.000,00	-
		<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1.6</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.545.419.986,83</b>	215.593.098,04

Jumlah tersebut merupakan selisih antara akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 dengan akumulasi penyusutan tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Penyusutan 2021	Penyusutan 2020
- Peralatan dan Mesin	10.923.550.977,20	9.791.271.775,38
- Gedung dan Bangunan	5.962.178.171,63	5.560.373.650,52
- Jalan Irigasi dan Jaringan	37.733.791,70	26.397.527,80
- Aset Tetap Lainnya	-	14.313.333,33
<b>Jumlah</b>	<b>16.923.462.940,53</b>	<b>15.392.356.287,03</b>

Penyusutan Tahun 2020, terdapat koreksi akumulasi penyusutan sebesar 14.313.333,33

Sehingga untuk Penyusutan Aset Tetap lainnya pada Neraca Tahun 2020 dihapuskan. maka penyusutan Aset tetap lainnya pada tahun 2020 menjadi Rp 0,-. Beban Penyusutan tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi :

	Uraian	Penyusutan 2021	Penyusutan 2020	Beban Penyusutan tahun 2021
-	Peralatan dan Mesin	10.923.550.977,20	9.791.271.775,38	1.132.279.201,82
-	Gedung dan Bangunan	5.962.178.171,63	5.560.373.650,52	401.804.521,11
-	Jalan Irigasi dan Jaringan	37.733.791,70	26.397.527,80	11.336.263,90
-	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>16.923.462.940,53</b>	<b>15.378.042.953,70</b>	<b>1.545.419.986,83</b>



### 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
5.3.1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>23.522.951.193,97</b>	<b>22.198.841.742,01</b>

Jumlah ekuitas tersebut merupakan jumlah ekuitas awal yang merupakan jumlah ekuitas Sekretariat DPRD per 31 Desember 2021.

5.3.2	<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(37.681.454.099,83)</b>	<b>(19.821.591.872,04)</b>
-------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban pada laporan operasional tahun 2021 dan tahun 2020, sebagai berikut

-	Pendapatan LO	0	0,00
-	Beban	37.681.454.099,83	19.821.591.872,04
	Surplus/Defisit LO	<b>(37.681.454.099,83)</b>	<b>(19.821.591.872,04)</b>

5.3.3	<b>R/K PPKD</b>	<b>36.934.834.549,00</b>	<b>22.802.401.271,00</b>
-------	-----------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari jumlah belanja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Tahun 2020.

5.3.4	<b>Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan</b>	-	<b>-1.656.699.947,00</b>
-	Mutasi tambah Aset Tetap	-	6.306.720,00
-	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	-1.663.006.667,00
-	Koreksi Akumulasi Penyusutan	14.313.333,33	-

Jumlah tersebut merupakan jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan tahun 2021 dan tahun 2020 Sekretariat DPRD yang terdiri dari koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp 14.313.333,33.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>5.3.5 Ekuitas Akhir</b>	<b>22.790.644.976,47</b>	<b>23.522.951.193,97</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir tahun 2021 dan 2020 Sekretariat DPRD

#### 5.4 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No	Perkiraan	Realisasi Thn 2021 (Rp.)	Realisasi Thn 2020 (Rp.)
<b>5.4.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>14.312.987.719,00</b>	<b>2.578.333.676,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai tahun 2021 dan tahun 2020, jumlah realisasi tersebut terinci atas :

-	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.475.735.240,00	1.240.139.100,00
-	Tunjangan Keluarga	142.610.507,00	123.134.528,00
-	Tunjangan Jabatan	137.785.000,00	121.680.000,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	48.450.000,00	37.570.000,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	1.302.254,00	1.476.576,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.613,00	-
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	256.679,00	-
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	3.554.126,00	11.905.353,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.352.248,00	-
-	Tunjangan Beras	92.697.600,00	78.430.860,00

Gaji Ketiga Belas	-	129.120.159,00
- Tunjangan Hari Raya	-	121.189.996,00
- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan anggota DPRD	-	110.304.000,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	586.189.158,00	581.647.104,00
- Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	185.135.000,00	-
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	7.750.000,00	-
- Uang Lembur PNS	-	-
- Uang Lembur Non PNS	-	21.736.000,00
- Belanja Uang dan Representasi DPRD	782.040.000,00	-
- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	77.057.400,00	-
- Belanja Tunjangan Beras DPRD	89.511.120,00	-
- Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	-
- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	-
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.898.100,00	-
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD	24.847.200,00	-
- Belanja Tunjangan KomunikasinIntensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	-
- Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	-
- Belanja Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD	325.074,00	-
- Belanja luran jaminan Kesehatan bagi DPRD	68.333.328,00	-
- Belanja jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.608.768,00	-
- Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.826.304,00	-

- Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.639.920.000,00	-
- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	-
- Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	-	-
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.304.000,00	-
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>14.312.987.719,00</b>	<b>2.578.333.676,00</b>

Jumlah realisasi belanja pegawai mencapai 98,02 % dari anggaran dan tidak ada pengembalian belanja pegawai ke kas daerah.

	<b>Realisasi Thn 2021</b>	<b>Realisasi Thn 2020</b>
	<b>(Rp.)</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>5.4.2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.996.151.027,00</b>	<b>17.066.013.995,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa tahun 2021 , terinci atas belanja berikut:

- Belanja Alat Tulis Kantor	-	140.047.000,00
- Belanja Alt Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, battery kering )	-	30.307.000,00
- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	-	27.864.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	43.493.000,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	-	12.077.800,00
- Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pakai Habis	-	87.547.400,00
- Belanja Logistik Kantor	-	10.175.000,00
- Belanja Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul-umbul, Lambang Negara	-	62.700.000,00
- Belanja Penghargaan (Tropi, Plakat, Tabanas, Alat Elektronik)	-	19.200.000,00

- Belanja Peralatan Olahraga	-	30.000.000,00
- Belanja Bahan Baku Bangunan	-	48.046.500,00
- Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	-	13.660.000,00
- Belanja Bahan Dokumentasi (Film, VCD/DVD, Cuci Cetak, Frame)	-	18.644.000,00
- Belanja Telepon	-	1.856.358,00
- Belanja Air	-	11.217.370,00
- Belanja Listrik	-	130.403.274,00
- Belanja Surat Kabar/ Majalah	-	92.718.500,00
- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	-	32.594.366,00
- Belanja Jasa Pengaman Kantor (security)	-	188.850.149,00
- Belanja Jasa Informasi/ Promosi/ Peliput Media Massa/ Cetak/ Elektronik	-	189.920.000,00
- Belanja Jasa Pengganti Transportasi	-	-
- Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)	-	199.522.800,00
- Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas/honoror	-	613.963.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Buruh/ Mekanik/ Mandor	-	28.275.000,00
- Belanja Jaminan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga	-	-
- Belanja Jasa service	-	34.711.367,00
- Belanja Penggantian Suku Cadang	-	66.013.950,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	-	278.254.526,00

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	-	30.748.400,00
- Belanja Cetak	-	55.235.000,00
- Belanja Penggandaan	-	82.019.800,00
- Belanja Jilid Non Cover	-	20.743.000,00
- Belanja sewa meja kursi	-	9.400.000,00
- Belanja sewa tenda	-	31.125.000,00
- Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias	-	-
- Belanja makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	149.309.200,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	273.320.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	83.038.000,00
- Belanja makanan dan minuman peserta	-	577.500.000,00
- Belanja Pakaian sipil Harian (PSH)	-	104.720.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	43.750.000,00
- Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	69.916.000,00
- Belanja Pakaian Adat Daerah	-	74.778.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	237.215.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	12.274.963.835,00
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	21.205.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	-	105.000.000,00
- Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	-	22.424.400,00
- Belanja bimbingan teknis	-	28.231.000,00

- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.050.000,00
- Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	-	3.600.000,00
- Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	-	15.000.000,00
- Honorarium Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ( PPK SKPD ) dan Pembantu PPK	-	13.650.000,00
- Honorarium Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK	-	69.350.000,00
- Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	-	24.750.000,00
- Honorarium Pegawai Honorers / Tidak Tetap	-	220.800.000,00
- Honorarium MC/Pembawa Acara	-	-
- Honorarium Pembaca Doa/Pembaca Al Quran	-	800.000,00
- Honorarium Pemimpin Lagu	-	800.000,00
- Belanja Buku	-	9.510.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	254.748.240,00	-
- Belanja Bahan-isi tabung gas	5.600.000,00	-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis kantor	223.102.750,00	-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	437.270.050,00	-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	16.525.000,00	-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.959.000,00	-
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.473.300,00	-
- Belanja Alat/Bahan untuk	30.538.600,00	-

kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya		
- Belanja Makan dan Minum Rapat	774.755.000,00	-
- Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	181.247.500,00	-
- Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	213.395.000,00	-
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.500.000,00	-
- Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	54.240.000,00	-
- Belanja Pakaian Adat Daerah	59.796.000,00	-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.110.000,00	-
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.240.000,00	-
- Honorarium Rohaniwan	3.450.000,00	-
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	31.716.000,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	552.561.250,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	74.200.000,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	220.800.000,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	281.334.000,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	175.184.633,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Supir	99.500.000,00	-
- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	600.000,00	-



- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	404.210.000,00	-
- Belanja Tagihan Telepon	1.157.301,00	-
- Belanja Tagihan Air	9.601.210,00	-
- Belanja Tagihan Listrik	131.350.280,00	-
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	344.640.000,00	-
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.164.500,00	-
- Belanja Lembur	314.400.000,00	-
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	34.279.766,00	-
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	2.202.648,00	-
- Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	6.607.944,00	-
- Belanja Sewa Peralatan Umum	136.150.000,00	-
- Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian lainnya	6.500.000,00	-
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	15.884.000,00	-
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	7.994.800,00	-
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	25.914.000,00	-
- Belanja Bimbingan Teknis	762.065.000,00	-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	179.249.604,00	-

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	71.290.000,00	-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.129.000,00	-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	-
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.410.000,00	-
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.233.000,00	-
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.750.000,00	-
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.379.376.651,00	-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.745.000,00	-
- Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	21.000.000,00	-
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.996.151.027,00</b>	<b>17.066.013.995,00</b>

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun 2021 mencapai 87.41 % dari yang di anggarkan.

No	Perkiraan	Realisasi Thn 2021 (Rp.)	Realisasi Thn 2020 (Rp.)
<b>5.4.3</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>625.695.803,00</b>	<b>3.158.053.600,00</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 dan tahun 2020. Terdiri dari:

<b>Belanja Modal Pengadaan</b>	-	<b>1.698.680.000,00</b>
<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	-	
- Belanja modal Pengadaan		
Kendaraan Dinas Bermotor	-	1.698.680.000,00
Perorangan		
<b>Belanja Modal Pengadaan</b>		
<b>Alat Pemeliharaan</b>	-	-
<b>Tanaman/Alat Penyimpan</b>		
- Belanja Modal Pengadaan Alat		
Penyimpanan	-	-
<b>Belanja modal Pengadaan</b>		
<b>Alat Kantor</b>	-	<b>265.211.500,00</b>
- Belanja modal Karpet	-	74.920.000,00
Belanja modal Pengadaan		
Generator Listrik ( Genset )	-	13.500.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat		
Pendingin Ruangan / AC / Kipas	-	32.450.000,00
Angin		
- Belanja Modal Pengadaan		
Gorden ( Vertical Blind )	-	144.341.500,00
- Belanja Modal Pengadaan		
Mesin Absensi	-	-
<b>Belanja modal Pengadaan</b>		
<b>Alat Rumah Tangga</b>	-	<b>230.180.000,00</b>
- Belanja Modal Pengadaan		
Meubleair	-	83.080.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat		
Pendingin	-	5.200.000,00
- Belanja modal Pengadaan Alat		
Rumah Tangga Lainnya	-	91.900.000,00
- Belanja Modal Pengadaan		
Penhias Ruangan	-	50.000.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan</b>		
<b>Komputer</b>	-	<b>551.032.100,00</b>
- Belanja modal Pengadaan		
Komputer Unit/Jaringan	-	50.875.000,00
- Belanja Modal Pengadaan		
Peralatan Personal Komputer	-	11.950.000,00
- Belanja modal Pengadaan	-	446.677.100,00

komputer note book / Laptop		
- Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter	-	32.980.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	-	8.550.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>-</b>	<b>60.950.000,00</b>
- Belanja modal Pengadaan meja Kerja Pejabat	-	17.250.000,00
- Belanja modal Pengadaan meja Rapat Pejabat	-	-
- Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	-	10.050.000,00
- Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	25.250.000,00
- Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	-	8.400.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Studio</b>	<b>-</b>	<b>352.000.000,00</b>
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	99.850.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Kamera / Handicam	-	144.700.000,00
- Pengadaan Peralatan Audio	-	64.800.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Televisi / Parabola	-	42.650.000,00
<b>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Belanja modal Pengadaan Billboard/ Baliho/ Whiteboard	-	-
- Belanja Modal Tanah Persil lainnya	199.213.219,00	-
- Belanja Modal Alat bantu Lainnya	2.610.000,00	-
- Belanja Modal Alat Kantor lainnya	5.975.000,00	-
- Belanja Modal Mebel	29.790.000,00	-

- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17.850.000,00	-
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	49.849.580,00	-
- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	59.460.000,00	-
- Belanja Modal Personal Komputer	104.432.100,00	-
- Belanja Modal Komputer unit lainnya	113.443.199,00	-
- Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya	28.884.330,00	-
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak lainnya	14.188.375,00	-
<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>625.695.803,00</b>	<b>3.158.053.600,00</b>



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### B. Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, pada pasal 3 ayat ( 1 ) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD
  - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
    - Sub Bagian Program dan Keuangan
    - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Rumah Tangga
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari :
    - Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
    - Sub Bagian Persidangan dan Risalah
    - Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi
  - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
    - Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
    - Sub Bagian Fasilitas Pengawasan
    - Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
- 
- Aspek Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota
    1. Peran Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota sebagai Penyelenggaraan Administrasi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan Tugas Pokok Sekretariat DPRD pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota komposisi keadaan Desember 2021 sebanyak 30 orang dan 48 orang Tenaga Harian Lepas.
- Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan kegiatan  
Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD, ini disebabkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang telah dilaksanakan pada kegiatan yang bersangkutan lambat dalam proses penyelesaian dan penyampaian ke bendahara. Selain itu hambatan lainnya hanya di sebabkan karena kendala waktu setelah pengesahan anggaran perubahan, sedikitnya waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan beberapa kegiatan. Disamping itu kondisi wabah pandemic COVID-19 turut mempengaruhi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kegiatan.





**BAB VII**  
**PENUTUP**

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran disusun laporan keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota Sekretariat DPRD diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dengan realisasi penggunaan anggaran. Adapun total realisasi belanja Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota dalam tahun anggaran 2021 tercatat sebesar Rp.36.934.834.549,00 jumlah tersebut mencapai 91.27% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.40.465.800.487,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	Rp	Rp	
Belanja Daerah	<b>40.465.800.487,00</b>	<b>36.934.834.549,00</b>	<b>91,27</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>39.766.814.487,00</b>	<b>36.309.138.746,00</b>	<b>91,31</b>
Belanja Pegawai	14.601.948.395,00	14.312.987.719,00	98,02
Belanja Barang	25.164.866.092,00	21.996.151.027,00	87,41
<b>Belanja Modal</b>	<b>698.986.000,00</b>	<b>625.695.803,00</b>	<b>89,51</b>
Belanja Modal Tanah	199.836.000,00	199.213.219,00	99,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	483.850.000,00	412.294.209,00	85,21
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	15.300.000,00	14.188.375,00	92,73
Jumlah	<b>40.465.800.487,00</b>	<b>36.934.834.549,00</b>	<b>91,27</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD dan wabah pandemic COVID-19.